

Perubahan Iklim sebagai Ancaman Keamanan Internasional (Studi Kasus Konflik Iklim di Darfur, Sudan)

Zadrach Barenz Windessy^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: 12a3saka2337@gmail.com*

Abstract. *This paper explores how climate change has contributed to the armed conflict in Darfur, Sudan, by emphasizing the human security perspective. Prolonged drought, desertification, and resource scarcity have intensified tensions between farming and pastoralist communities. Using a case study method and the Human Security framework, this study finds that ecological stress acts as a threat multiplier in conflict-prone areas. Data from IPCC, SIPRI, and UNHCR reports highlight how environmental degradation worsens structural vulnerabilities and fuels horizontal violence. The analysis shows that climate change is not only an environmental issue but also a serious security concern in fragile states. The failure of state institutions to equitably manage natural resources exacerbates the crisis. Therefore, a long-term, multi-sectoral policy response is urgently needed. Integrating climate resilience into international security strategies is essential to protect basic human rights.*

Keywords. *Climate Change, Darfur, Environmental Conflict, Human Security, Resource Scarcity*

Abstrak. Tulisan ini membahas peran perubahan iklim sebagai faktor pemicu konflik bersenjata di Darfur, Sudan, dengan menekankan dimensi keamanan manusia. Ketegangan antara komunitas petani dan penggembala yang dipicu oleh kelangkaan air dan lahan akibat kekeringan serta degradasi lingkungan menunjukkan bahwa krisis ekologis memiliki dampak serius terhadap stabilitas sosial. Dengan menggunakan pendekatan Human Security dan metode studi kasus, tulisan ini menunjukkan bahwa tekanan ekologis berkontribusi dalam memperburuk ketimpangan struktural dan memperbesar potensi kekerasan horizontal di wilayah rentan. Melalui analisis terhadap laporan IPCC, SIPRI, dan UNHCR, ditemukan bahwa perubahan iklim bertindak sebagai threat multiplier yang memperdalam konflik, khususnya di negara dengan kapasitas adaptasi yang rendah. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan iklim dan keamanan internasional sebagai respons jangka panjang yang berorientasi pada perlindungan hak dasar manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Kata kunci: Perubahan Iklim, Darfur, Keamanan Manusia, Konflik Lingkungan, Kelangkaan Sumber Daya

1. LATAR BELAKANG

Isu perubahan iklim kini tidak lagi sekadar menjadi perhatian para ahli lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman strategis yang memengaruhi stabilitas global. Perubahan pola iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata bumi, kekeringan ekstrem, dan gangguan cuaca lainnya berdampak langsung terhadap kehidupan jutaan orang, khususnya di negara-negara yang belum memiliki kemampuan adaptasi yang memadai. Dalam banyak kasus, tekanan iklim ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi yang sudah rapuh, serta memicu ketegangan baru di masyarakat yang mengalami kerentanan struktural.

Beberapa lembaga internasional telah menegaskan pentingnya memandang perubahan iklim sebagai faktor yang memperbesar risiko konflik. Berbagai riset menunjukkan bahwa kejadian ekstrem akibat perubahan iklim, seperti kekeringan berkepanjangan dan banjir besar, berkontribusi dalam memperpanjang durasi konflik serta memperdalam eskalasi kekerasan di wilayah-wilayah dengan kerentanan struktural tinggi. Sebuah riset yang dilakukan oleh *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* menyoroti tentang tekanan lingkungan yang terus meningkat dapat mempercepat disintegrasi sosial, utamanya di wilayah kawasan yang memiliki sejarah konflik antar etnis dan juga lemahnya sistem pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, konflik di Darfur menjadi salah satu studi yang relevan untuk memahami bagaimana tekanan ekologi dapat berperan dalam mendorong kekerasan skala besar. Kekeringan yang terjadi sejak dekade 1980-an memicu migrasi besar-besaran penduduk penggembala ke wilayah pertanian, menciptakan perebutan akses terhadap air dan lahan subur. Ketegangan antara komunitas lokal kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor bersenjata dan rezim politik untuk memperluas konflik. Meski sering kali dipahami sebagai benturan etnis atau pemberontakan politik, faktor lingkungan yang turut mempercepat konflik ini kerap luput dari perhatian.

Berbagai studi sebelumnya cenderung menempatkan isu perubahan iklim dan keamanan sebagai dua bidang yang terpisah. Hal ini menyisakan celah analisis yang cukup signifikan dalam memahami konflik multidimensional seperti yang terjadi di Darfur. Oleh karena itu, tulisan ini mengusulkan pendekatan berbasis *Human Security*, sebuah perspektif yang mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan manusia di atas kepentingan negara semata. Pendekatan ini menawarkan lensa yang lebih menyeluruh untuk menilai bagaimana tekanan lingkungan dapat mengancam hak dasar individu dan menimbulkan krisis kemanusiaan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara dinamika iklim dan konflik sosial yang berdampak lintas negara, dengan fokus pada Darfur sebagai studi kasus. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana komunitas internasional telah merespons ancaman keamanan berbasis iklim, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat mendukung integrasi kebijakan iklim dan keamanan internasional di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep keamanan dalam studi hubungan internasional telah mengalami pergeseran perpektif. Pendekatan tradisional yang selama ini berpusat pada kekuatan militer dan perlindungan kedaulatan negara, dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai tantangan kontemporer yang bersifat multidimensional. Salah satu gagasan yang menandai transisi ini adalah pendekatan *Human Security*, yang diperkenalkan secara sistematis oleh

United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1994 (UNDP, 1994, p. 22) Pendekatan ini menawarkan perspektif bahwa keamanan bukan hanya menyangkut pertahanan teritorial, tetapi juga jaminan perlindungan terhadap kehidupan manusia dari ancaman-ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, penyakit, konflik sosial, dan bencana lingkungan.

Human Security membagi ancaman terhadap individu ke dalam tujuh kategori, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh dimensi ini merefleksikan kebutuhan dasar manusia yang saling berkaitan dan dapat terganggu oleh tekanan eksternal seperti perubahan iklim. Dalam kerangka ini, perubahan iklim tidak hanya dipahami sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi merusak ketahanan komunitas, memperparah ketimpangan sosial, dan memicu konflik akibat perebutan sumber daya alam. UNDP menekankan bahwa rasa aman bagi individu bukan hanya soal terlindungi dari kekerasan fisik, tetapi juga kemampuan untuk hidup layak, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan terbebas dari rasa takut serta ketidakpastian masa depan. Dalam konteks konflik Darfur, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana perubahan iklim berkontribusi terhadap ketidakamanan manusia. Ketika air dan lahan menjadi langka akibat kekeringan dan desertifikasi, komunitas lokal mengalami tekanan ekonomi, dislokasi sosial, dan ketegangan etnis yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, Human Security menjadi kerangka teoritis yang tepat dalam memahami dinamika konflik iklim sebagai bagian dari tantangan keamanan internasional masa kini.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Tulisan ini, penulis menggunakan tulisan ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan strategi studi kasus untuk mendalami keterkaitan antara perubahan iklim dan konflik di Darfur, Sudan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap laporan lembaga internasional seperti IPCC, UNDP, SIPRI, dan UNHCR, serta artikel ilmiah dan buku relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, dengan menyoroti bagaimana perubahan iklim bertindak sebagai *threat multiplier* yang memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di kawasan rentan. Kerangka Human Security digunakan untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap keamanan manusia secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma keamanan internasional telah mengalami pergeseran yang signifikan. Jika sebelumnya isu keamanan terutama berfokus pada ancaman militer dan konflik antarnegara, kini perhatian mulai bergeser ke arah ancaman non-tradisional, salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman lintas batas yang bersifat sistemik dan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan negara, masyarakat, dan individu.

Dimensi Ancaman Perubahan Iklim Terhadap Keamanan Internasional

Fenomena perubahan iklim tidak bekerja secara linier, tetapi melalui efek domino yang kompleks dan saling terkait. Perubahan pola curah hujan, kekeringan berkepanjangan, kenaikan suhu rata-rata, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir atau badai telah mengubah lanskap ekologis dan sosial di berbagai belahan dunia. Akibatnya, ketersediaan air dan pangan terganggu, aktivitas pertanian melemah, dan populasi terpaksa berpindah tempat untuk bertahan hidup. Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial yang berujung pada ketegangan horizontal antar kelompok, serta memperbesar kemungkinan konflik sosial dan politik. Konsep *threat multiplier* banyak digunakan dalam studi keamanan iklim untuk menjelaskan bahwa perubahan iklim memperparah kondisi yang sudah rentan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh *Center for Naval Analyses (CNA) Military Advisory Board* pada 2007, dan sejak itu diadopsi oleh berbagai lembaga termasuk Pentagon, PBB, dan IPCC (Goodman & Baudu, 2023). Perubahan iklim tidak serta-merta menyebabkan konflik, namun memperbesar risiko konflik dengan menekan akses terhadap sumber daya penting dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi maupun politik (Stockholm International Peace Research Institute, 2016, p. 455).

Dalam laporan IPCC tahun 2022, dijelaskan secara eksplisit bahwa pada tingkat pemanasan global yang lebih tinggi, dampak iklim seperti kekeringan ekstrem akan semakin memperbesar kemungkinan konflik bersenjata internal, khususnya di wilayah dengan kapasitas adaptasi rendah. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyatakan bahwa perubahan iklim dapat membentuk kondisi bagi kekerasan dalam negara melalui peningkatan kerentanan ekonomi, politik, dan sosial (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, p. 2). Ini berarti bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tetapi bagian integral dari ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Dampak perubahan iklim juga tidak terjadi secara merata. Negara-negara berkembang, khususnya yang berada di kawasan Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan negara-negara kepulauan kecil, sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketimpangan ini muncul karena mereka memiliki ketergantungan tinggi

terhadap sektor pertanian dan sumber daya alam, serta belum memiliki infrastruktur adaptasi yang memadai. Hal ini menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan, kelangkaan sumber daya, dan potensi konflik. Lebih dari itu, tekanan iklim juga memengaruhi dinamika migrasi. Ketika suatu wilayah tidak lagi mampu mendukung kehidupan akibat perubahan iklim, populasi terpaksa bermigrasi ke wilayah lain yang lebih layak. Namun, dalam banyak kasus, wilayah tujuan migrasi tidak siap menerima tambahan populasi, sehingga menciptakan friksi sosial yang rawan konflik. Hal ini telah terjadi di berbagai tempat, mulai dari kawasan Sahel di Afrika, hingga Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dengan memperhatikan dimensi ini, terlihat jelas bahwa perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka keamanan yang lebih luas. Tidak hanya berdampak pada keseimbangan lingkungan, perubahan iklim dapat mengancam kelangsungan hidup individu, stabilitas komunitas, dan ketahanan institusi negara.

Kronologi dan Dinamika Konflik Iklim di Darfur

Transisi dari krisis iklim menuju konflik bersenjata di Darfur merupakan contoh konkret bagaimana tekanan lingkungan bertindak sebagai katalis terhadap ketegangan sosial yang telah ada. Ketika degradasi lingkungan seperti kekeringan ekstrem dan desertifikasi mengganggu akses terhadap air dan lahan subur, masyarakat terdorong ke dalam kompetisi atas sumber daya yang kian langka. Proses ini dapat dijelaskan dalam tiga tahap: pertama, tekanan iklim menciptakan kelangkaan ekologis yang akut; kedua, kelangkaan ini memicu ketegangan antar komunitas, khususnya antara petani dan penggembala; ketiga, konflik tersebut memburuk ketika tidak ada mekanisme resolusi damai dan justru dimanfaatkan oleh aktor militer dan politik untuk memperluas kekerasan. Dalam konteks Darfur, tekanan ekologis yang berkepanjangan menjadi pemicu awal dari konflik bersenjata besar-besaran yang berlangsung hingga kini.

Konflik di Darfur, Sudan, telah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di awal abad ke-21. Meskipun sering dijelaskan dalam kerangka etnis atau politik, akar konflik ini memiliki dimensi ekologis yang sangat kuat. Dalam konteks perubahan iklim global, Darfur menjadi salah satu contoh nyata bagaimana degradasi lingkungan dapat memicu ketegangan sosial yang berkembang menjadi konflik bersenjata berskala luas. Darfur terletak di wilayah semi-kering (semi-arid) Sudan barat, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian subsisten dan penggembalaan. Sejak awal 1980-an, wilayah ini mengalami kekeringan hebat yang berlangsung bertahun-tahun. Kekeringan tersebut menyebabkan penurunan produktivitas tanah secara drastis dan mempercepat proses desertifikasi. Lahan-lahan subur yang dulunya menopang komunitas pertanian dan peternakan berubah menjadi tanah tandus yang tak lagi mampu mendukung kehidupan (Oforle & Emmanuel, 2012, p. 95).

Kondisi ini memaksa kelompok penggembala, terutama dari etnis Arab nomaden, bermigrasi ke arah selatan, wilayah yang dihuni oleh komunitas petani non-Arab. Perpindahan ini menimbulkan persaingan baru atas sumber daya yang semakin langka, terutama air dan lahan subur. Ketegangan antara petani dan penggembala bukan hal baru di wilayah ini, tetapi situasi menjadi jauh lebih genting ketika tekanan iklim memperburuk volume sumber daya dan mempercepat migrasi internal secara besar-besaran. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, konflik atas air dan tanah pun berubah menjadi kekerasan antar kelompok.

Dalam konteks ini, pendekatan Human Security hadir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma keamanan tradisional yang berpusat pada negara. Human Security menempatkan manusia, bukan negara, sebagai subjek utama dalam analisis keamanan. Hal ini memungkinkan perhatian dialihkan dari aktor-aktor negara ke individu-individu yang terdampak langsung oleh konflik, seperti petani yang kehilangan lahan, perempuan korban kekerasan seksual, dan anak-anak yang mengalami kelaparan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan di Darfur, karena perubahan iklim di wilayah tersebut tidak hanya menciptakan krisis ekologis, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada, seperti diskriminasi etnis dan eksklusi politik. Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, yang pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk respon internasional, mulai dari intervensi kemanusiaan hingga tekanan diplomatik terhadap pemerintah Sudan.

Menurut Oforle, degradasi lingkungan memainkan peran penting sebagai katalis konflik di Darfur, khususnya karena absennya mekanisme penyelesaian konflik lokal yang memadai dan lemahnya kapasitas pemerintah pusat dalam mengatur distribusi sumber daya alam secara adil (Oforle & Emmanuel, 2012, p. 95). Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan politik. Kekacauan ini diperparah oleh munculnya pemberontakan dari kelompok seperti *Sudan Liberation Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang menentang marginalisasi Darfur oleh pemerintah pusat di Khartoum. Menanggapi pemberontakan tersebut, pemerintah Sudan mengerahkan milisi bersenjata yang dikenal sebagai Janjaweed, yang sebagian besar direkrut dari komunitas penggembala. Milisi ini terlibat dalam aksi kekerasan sistematis terhadap komunitas petani, termasuk pembakaran desa, pembunuhan massal, dan pemerkosaan. Eskalasi konflik yang bermula dari degradasi ekologis pun berubah menjadi bencana kemanusiaan berskala besar.

Data dari UNHCR menunjukkan bahwa sejak konflik memuncak pada tahun 2003, lebih dari 2,5 juta orang mengungsi dari wilayah Darfur. Menurut *Sudan Situation Overview* (UNHCR, 2025, p. 1), hingga Oktober 2024, total pengungsi internal di seluruh Sudan

mencapai 11,3 juta orang, dengan lebih dari 25 juta lainnya berada dalam kondisi darurat dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Selain pengungsian, konflik juga memicu kelaparan luas, kolapsnya layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular seperti kolera (UNHCR, 2025, p. 1). Kekeringan dan migrasi akibat perubahan iklim di Darfur tidak hanya menyebabkan pergeseran demografis, tetapi juga melemahkan struktur sosial-komunal. Ketika komunitas kehilangan lahan dan air, mereka juga kehilangan penghidupan, identitas kultural, dan struktur perlindungan sosial yang selama ini menopang mereka. Hal ini menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap radikalisasi, perekrutan milisi, dan kekerasan horizontal.

Dalam laporan SIPRI, disebutkan bahwa interaksi antara degradasi lingkungan dan ketegangan sosial-politik dapat mempercepat konflik, khususnya di wilayah yang memiliki sejarah marginalisasi dan kapasitas negara yang lemah. Darfur memenuhi hampir seluruh indikator ini: degradasi sumber daya, ketimpangan ekonomi, identitas etnis yang terpolarisasi, dan lemahnya pemerintahan pusat. Konflik Darfur juga memperlihatkan bagaimana perubahan iklim dapat berinteraksi dengan faktor-faktor historis dan struktural lainnya (Stockholm International Peace Research Institute, 2016, p. 455). Sebagaimana dicatat dalam IPCC, kondisi iklim ekstrem seperti kekeringan memperbesar kerentanan masyarakat terhadap kekerasan dan memperlemah mekanisme penyelesaian damai (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, p. 2). Ini berarti bahwa konflik Darfur bukan sekadar persoalan lokal, tetapi merupakan gejala dari ketegangan yang lebih besar antara manusia dan lingkungan dalam konteks perubahan iklim global.

Banyak pihak menyepakati bahwa tanpa krisis iklim dan degradasi lingkungan, konflik di Darfur mungkin tidak akan meledak dengan skala dan kekerasan yang sedemikian besar. Oleh karena itu, melihat dinamika Darfur hanya dari sudut pandang etnis atau politik semata akan sangat menyederhanakan kompleksitas masalah. Justru sebaliknya, konflik ini memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan analisis iklim dan sumber daya alam ke dalam kajian perdamaian dan keamanan. Dengan memahami kronologi dan dinamika konflik Darfur secara utuh, terlihat bahwa perubahan iklim berperan sebagai pemicu tidak langsung namun sangat signifikan. Ketika tekanan ekologis memperburuk ketegangan sosial yang telah ada, dan negara gagal merespons secara adil dan inklusif, maka kekerasan bersenjata menjadi tidak terhindarkan. Darfur, dengan segala tragedinya, menjadi cermin awal dari krisis iklim yang dapat memicu instabilitas serupa di wilayah lain yang rentan di dunia.

Analisis Human Security terhadap Krisis Darfur

Untuk memahami kompleksitas krisis di Darfur, pendekatan tradisional dalam studi keamanan negara tidak lagi memadai. Konflik ini tidak hanya melibatkan aktor bersenjata atau dinamika militer-politik, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur sosial dan ekologis dalam melindungi masyarakat dari tekanan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Dalam konteks ini, pendekatan Human Security menjadi sangat relevan karena menempatkan manusia bukan negara sebagai objek utama perlindungan, serta memperluas cakupan keamanan dari ancaman militer ke dimensi kehidupan dasar. Gagasan Human Security secara resmi diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1994. Dalam laporan tersebut, UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai perlindungan terhadap ancaman kronis dan gangguan mendadak terhadap pola kehidupan sehari-hari masyarakat. Konsep ini mencakup tujuh dimensi: keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik (UNDP, 1994, pp. 22-24). Melalui kerangka ini, Darfur dapat dilihat sebagai ruang di mana seluruh lapisan keamanan manusia runtuh akibat kombinasi tekanan ekologis, politik, dan sosial.

Pertama, krisis Darfur sangat berdampak pada keamanan pangan dan ekonomi masyarakat. Kekeringan berkepanjangan dan penurunan produktivitas lahan telah menghancurkan sumber penghidupan utama, yaitu pertanian dan peternakan. Ketika lahan gagal ditanami dan ternak tidak bisa digembalakan, masyarakat kehilangan akses terhadap pangan dan pendapatan. Hal ini tidak hanya memicu kelaparan, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Kedua, dari sisi keamanan lingkungan, degradasi ekologis di Darfur berlangsung dalam skala masif dan sistemik. Desertifikasi, hilangnya vegetasi alami, dan penggundulan hutan akibat tekanan populasi memperburuk kondisi tanah dan menyebabkan kelangkaan sumber daya yang selama ini menopang kehidupan komunitas. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan SIPRI, degradasi lingkungan menjadi pemicu konflik ketika dikombinasikan dengan lemahnya struktur pemerintahan dan akses tidak adil terhadap sumber daya (Stockholm International Peace Research Institute, 2016). Kondisi inilah yang terjadi di Darfur, di mana negara gagal mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara merata.

Di Darfur, degradasi lingkungan dan perubahan iklim secara langsung mengancam hak dasar manusia untuk bertaahan hidup. Ketika akses terhadap air bersih, lahan subur, dan hasil panen makin sulit, orang-orang mulai bersaing untuk bertahan. Awalnya ini hanya ketegangan biasa antara kelompok petani dan penggembala, tapi lama-lama berubah menjadi kekerasan

struktural dan akhirnya konflik bersenjata. Hal tersebut sejalan dengan teori Malthus yang berpendapat jika populasi tumbuh lebih cepat daripada ketersediaan pangan, akan memberi tekanan terhadap sumber daya alam yang sudah ada, di mana tekanan populasi terhadap sumber daya langka menjadi pemicu ketidakamanan dan kekerasan multidimensi yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik (Malthus, 1998).

Populasi di wilayah itu memang meningkat sejak pertengahan abad ke-20. Tapi curah hujan justru menurun dan tanah makin rusak karena kekeringan dan cara bertani yang tidak ramah lingkungan (UNEP, 2007). Banyak penggembala akhirnya pindah ke wilayah petani karena rumput dan air di daerah asal mereka habis. Perebutan sumber daya pun makin tajam. Sejak awal 1980-an, peneliti sudah mencatat bahwa Darfur makin kering, padang rumput berubah jadi gurun, dan hasil pertanian turun drastis (Kevane & Gray, 2008). Semua ini membuat tekanan makin besar, bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi, politik, bahkan identitas. Konflik yang awalnya soal air dan lahan jadi bencana kemanusiaan yang rumit. Kalau melihat ini semua, rasanya jelas bahwa konflik di Darfur bukan cuma karena perang atau politik, tapi juga karena sumber daya yang semakin menipis dan jumlah orang yang terus bertambah (Dixon, 1999).

Ketiga, keamanan pribadi masyarakat sangat terganggu. Konflik bersenjata yang berlangsung sejak awal 2000-an menyebabkan ribuan desa dihancurkan dan warga sipil menjadi target kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Komunitas petani dan penggembala yang dulunya hidup berdampingan dalam struktur sosial yang relatif stabil kini saling bermusuhan akibat perebutan sumber daya dan intervensi aktor militer. Dalam banyak kasus, warga sipil tidak hanya kehilangan rumah dan tanah, tetapi juga jaringan sosial dan jaminan rasa aman dalam komunitasnya. Keempat, krisis ini juga meruntuhkan keamanan komunitas. Ketika institusi lokal tidak mampu merespons konflik, dan aktor eksternal (seperti pemerintah pusat atau milisi bersenjata) malah memperparah situasi, komunitas mengalami disintegrasi. Solidaritas sosial yang menjadi benteng ketahanan masyarakat tercerai-berai, dan banyak individu terpaksa bergabung dengan kelompok bersenjata untuk bertahan hidup atau membalas dendam. Selain itu, keamanan kesehatan masyarakat turut tergerus. Jutaan warga Darfur hidup dalam kondisi pengungsian dengan akses sangat terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan (UNHCR, 2025, p. 1). Wabah penyakit seperti kolera, malaria, dan infeksi saluran pernapasan menjadi umum, sementara kapasitas layanan kesehatan sangat terbatas. Hal ini menjadikan krisis Darfur sebagai kombinasi dari kekerasan fisik dan bencana kemanusiaan yang kompleks. Dari perspektif keamanan politik, ketidakmampuan pemerintah Sudan dalam melindungi warganya bahkan dalam banyak kasus justru menjadi pelaku kekerasan

mencerminkan gagalnya kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Konsep Human Security menuntut negara untuk menjadi penyedia rasa aman, bukan sumber ancaman. Namun di Darfur, fungsi negara sebagian besar absen atau bias terhadap satu kelompok tertentu, menyebabkan sebagian besar populasi kehilangan representasi politik dan akses terhadap keadilan.

Terakhir, kerangka ini juga menekankan bahwa keamanan manusia bersifat saling terhubung kegagalan dalam satu dimensi (misalnya pangan) dapat memicu gangguan di dimensi lain (seperti keamanan pribadi atau komunitas). Dalam kasus Darfur, runtuhnya fondasi ekonomi dan lingkungan menjadi titik awal kehancuran berlapis yang menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan Human Security, konflik di Darfur tidak hanya dipahami sebagai pertempuran antara kelompok etnis atau pemberontakan terhadap pemerintah, tetapi sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak hidup yang layak bagi individu dan komunitas. Ketika tekanan lingkungan memperparah kemiskinan, ketimpangan sosial dibiarkan tumbuh, dan negara tidak hadir untuk menjembatani konflik maka kekerasan menjadi satu-satunya saluran ekspresi. Dengan demikian, Human Security bukan hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi juga alat analitis yang memungkinkan kita melihat konflik secara lebih menyeluruh. Ia menjembatani antara isu perubahan iklim, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini menuntut agar strategi resolusi konflik dan bantuan kemanusiaan juga mencakup pembangunan kembali sistem sosial, pemulihan mata pencaharian, dan penguatan kapasitas komunitas. Kasus Darfur memberikan pelajaran penting bahwa ketika dimensi-dimensi dasar kehidupan manusia gagal dilindungi, konflik menjadi konsekuensi yang hampir tak terelakkan. Oleh karena itu, respons terhadap krisis semacam ini tidak cukup hanya dengan diplomasi atau intervensi militer, tetapi harus menyentuh akar persoalan: yaitu hilangnya rasa aman manusia dalam arti yang paling mendasar.

Intervensi Internasional dan Ketimpangannya

Respons komunitas internasional terhadap konflik di Darfur sejak awal menunjukkan ambivalensi antara kepedulian kemanusiaan dan kepentingan geopolitik. Meskipun penderitaan warga sipil di wilayah ini telah menjadi perhatian global sejak awal 2000-an, intervensi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, sektoral, dan sering kali gagal menyentuh akar permasalahan, yaitu degradasi lingkungan dan kerentanan struktural akibat perubahan iklim. Setelah eskalasi konflik mencapai puncaknya pada 2003, Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan *African Union Mission in Sudan (AMIS)*, yang kemudian diperluas menjadi *United Nations African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)* pada

2007. Mandat utama UNAMID adalah menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Namun, operasi ini sejak awal mengalami keterbatasan logistik, ketergantungan pada persetujuan Pemerintah Sudan, serta kekurangan dalam kapasitas analisis konflik berbasis lingkungan.

Di lapangan, kehadiran UNAMID tidak serta-merta menghentikan kekerasan atau memperkuat ketahanan komunitas. Banyak desa tetap mengalami serangan, dan pengungsi tidak dapat kembali ke kampung halamannya karena kondisi keamanan yang belum stabil dan lahan yang telah rusak parah. Selain itu, karena fokus utama UNAMID adalah pada stabilisasi politik dan pengamanan gencatan senjata, dimensi perubahan iklim tidak masuk dalam analisis strategis maupun program lapangan mereka. Di sisi kemanusiaan, berbagai lembaga internasional seperti UNHCR, WFP, dan OCHA telah memberikan bantuan logistik, pangan, dan perlindungan bagi jutaan pengungsi di dalam dan luar Sudan. Namun laporan terbaru dari UNHCR menunjukkan bahwa skala krisis kemanusiaan di Sudan terus memburuk. Hingga Oktober 2024, lebih dari 11,3 juta orang mengungsi, dan 25 juta lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan, sebagian besar berada di wilayah yang sangat sulit dijangkau menyebut bahwa kendala akses, konflik aktif, dan pendanaan yang tidak mencukupi menyebabkan penyaluran bantuan tidak optimal. Bahkan, hanya sekitar 40 persen dari total kebutuhan dana kemanusiaan yang dapat dipenuhi pada tahun berjalan. Ini berarti bahwa lebih dari separuh warga terdampak krisis di Darfur dan wilayah lain tidak menerima dukungan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, apalagi untuk memulihkan kehidupan mereka secara jangka panjang. Ketimpangan juga tampak pada pendekatan strategis antara negara-negara donor dan komunitas lokal. Dalam banyak kasus, keputusan bantuan dan program intervensi lebih ditentukan oleh logika manajemen krisis jangka pendek daripada transformasi struktural. Pendekatan ini sering kali menempatkan komunitas terdampak sebagai objek pasif penerima bantuan, bukan sebagai aktor aktif dalam pemulihan. Di sisi lain, isu perubahan iklim yang jelas berkontribusi terhadap krisis Darfur justru jarang dimasukkan ke dalam kebijakan tanggap darurat.

Berdasarkan laporan dari SIPRI disebutkan bahwa banyak respons internasional terhadap konflik bersifat terlalu teknokratik dan kurang mempertimbangkan interaksi antara fragilitas negara dan faktor lingkungan. Padahal, menurut laporan tersebut, respons yang tidak menyentuh akar penyebab konflik hanya akan memperpanjang ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan meningkatkan potensi kekerasan baru di masa depan (Stockholm International Peace Research Institute, 2016). Dalam kasus Darfur, pendekatan militeristik dan kemanusiaan terbukti belum cukup menjawab kompleksitas krisis yang dipicu oleh faktor

iklim. Misalnya, tidak ada program besar dalam misi perdamaian PBB yang secara khusus menangani rehabilitasi ekologis seperti restorasi lahan, reboisasi, atau pengelolaan air berbasis komunitas. Padahal degradasi lingkungan adalah salah satu faktor utama yang mendorong konflik awal di wilayah ini (Oforle & Emmanuel, 2012, p. 96).

Selain itu, kerangka kerja antar lembaga internasional juga menunjukkan kurangnya integrasi. Lembaga yang menangani isu lingkungan dan perubahan iklim (seperti UNEP atau UNDP) sering tidak terhubung langsung dengan operasi kemanusiaan dan keamanan. Akibatnya, kebijakan menjadi terfragmentasi, dan komunitas lokal tidak mendapatkan dukungan holistik yang mampu mengurangi kerentanan mereka secara sistemik. Kritik terhadap respons internasional juga datang dari berbagai akademisi dan lembaga riset. Mereka menyoroti bahwa krisis iklim seperti di Darfur memerlukan pendekatan keamanan yang berfokus pada human security, bukan hanya keamanan negara atau stabilitas politik. Pendekatan ini menekankan perlindungan atas kehidupan dasar manusia dan ketahanan komunitas terhadap guncangan ekologis maupun sosial. Oleh karena itu, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian tidak bisa dilepaskan dari upaya adaptasi iklim dan penguatan kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan (UNDP, 1994, pp. 23-24).

Diperlukan reformasi dalam arsitektur respons internasional, agar pendekatan terhadap konflik tidak bersifat satu dimensi. Ini mencakup integrasi antara diplomasi, perlindungan hak asasi manusia, manajemen sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kombinasi pendekatan ini akan memperkuat ketahanan masyarakat lokal dan memperkecil peluang munculnya konflik baru akibat tekanan lingkungan yang terus meningkat. Akhirnya, pelajaran dari Darfur mengingatkan bahwa intervensi internasional yang tidak memahami konteks ekologis dan sosial secara utuh hanya akan bersifat tamal sulam. Respons terhadap konflik iklim harus dimulai dari pengakuan atas peran perubahan iklim sebagai faktor strategis, bukan sekadar latar belakang. Tanpa pemahaman dan pendekatan lintas sektor, krisis seperti yang terjadi di Darfur berpotensi berulang di wilayah lain yang mengalami tekanan iklim serupa. Pendekatan komunitas internasional terhadap krisis di Darfur menunjukkan kecenderungan yang bersifat reaktif dan terlalu fokus pada stabilitas jangka pendek. Misi UNAMID, yang dibentuk untuk menjaga gencatan senjata dan melindungi warga sipil, gagal menjawab persoalan mendasar yang menjadi pemicu konflik, seperti degradasi lingkungan, kurangnya reformasi tata guna lahan, dan distribusi air yang timpang. Upaya internasional yang lebih menekankan pada aspek militer dan diplomatik justru mengabaikan kebutuhan struktural masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh perubahan iklim.

Kerangka keamanan konvensional terbukti tidak memadai dalam mencegah pecahnya konflik yang berakar dari kelangkaan sumber daya. Dalam hal ini, pendekatan Human Security menawarkan kritik tajam terhadap paradigma lama dengan menekankan pentingnya sekuritisasi perubahan iklim secara menyeluruh yakni melalui kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia, bukan semata menjaga stabilitas politik. Tata kelola sumber daya harus dirancang secara inklusif, memastikan keterlibatan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan, menjamin distribusi yang adil, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Darfur menjadi bukti bahwa tanpa keadilan ekologis dan sosial, intervensi keamanan tidak hanya tidak efektif, tetapi juga bisa memperpanjang penderitaan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, seharusnya ada sistem pemantauan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendeteksi gejala awal krisis. Pemantauan terhadap perubahan pola migrasi peternak, penurunan hasil pertanian, hingga lonjakan harga pangan lokal dapat menjadi indikator penting dalam merespons lebih dini potensi ketegangan sosial. Tanpa sistem pencegahan semacam ini, respons internasional akan selalu tertinggal dari realitas di lapangan. Kegagalan Darfur bukan hanya terletak pada konflik yang terjadi, tetapi juga pada ketidakmampuan arsitektur keamanan global untuk mengantisipasi risiko sistemik yang lahir dari krisis iklim. Oleh karena itu, perlu reformasi besar dalam cara dunia memandang keamanan dari yang sempit dan militeristik, menjadi luas, preventif, dan berakar pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekologis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik bersenjata di Darfur bukan semata-mata persoalan politik atau etnis, melainkan hasil akumulasi tekanan ekologis yang telah lama diabaikan. Perubahan iklim, dalam bentuk kekeringan ekstrem, degradasi lahan, dan kelangkaan sumber daya, telah memicu kompetisi antarkelompok yang kemudian berkembang menjadi kekerasan sistemik. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim berfungsi sebagai *threat multiplier* yang memperburuk ketegangan di masyarakat dengan kerentanan struktural tinggi. Pendekatan Human Security mampu menjelaskan secara menyeluruh bagaimana dimensi lingkungan, sosial, dan politik saling berkait dalam membentuk krisis kemanusiaan seperti di Darfur. Dengan kata lain, keamanan manusia hanya bisa dicapai jika tekanan lingkungan diatasi secara adil dan inklusif.

Untuk merespons kompleksitas konflik iklim seperti di Darfur, pendekatan keamanan konvensional perlu direformulasi. Negara dan komunitas internasional harus menempatkan adaptasi iklim dan keadilan ekologis sebagai bagian dari strategi perdamaian jangka panjang. Ini termasuk membangun sistem pemantauan risiko berbasis komunitas, memperkuat kapasitas adaptif masyarakat lokal, serta memastikan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, integrasi lintas sektor antara kebijakan lingkungan, kemanusiaan, dan keamanan perlu

didorong secara lebih sistematis. Dengan langkah tersebut, potensi konflik di wilayah-wilayah rentan akibat krisis iklim di masa depan dapat ditekan secara preventif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, P., & Sulaiman, Y. (2019). Indonesia, ASEAN centrality and global maritime fulcrum. *Jurnal Global & Strategis*, 80.
- Bradford, L. J. (2005). The growing prospects for maritime security cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Dixon, T. (1999). Environment, scarcity, and violence. *Contemporary Human Ecology*, 76–86.
- Farhana. (2022). Indonesia's maritime diplomacy in ASEAN: An international vision in the face of national challenges. In *ASEAN maritime security* (pp. 80–92).
- Febrica, S. (2017). *Maritime security and Indonesia*. Routledge.
- Goodman, S., & Baudu, P. (2023, January 3). *Climate change as a “threat multiplier”*. The Council on Strategic Risks. <https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2023/01/38-CCThreatMultiplier.pdf>
- Guricci, M. F., & Seniwati. (2024). Strategi keamanan maritim di Asia Tenggara: Kerjasama diplomasi maritim di ASEAN. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 130–139.
- Hadiningrat, J. K. (2020). Diplomasi maritim: Meletakkan fondasi poros maritim dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesia Maritime Journal)*, 105.
- Hong, L. Q. (2021). The effect of maritime cluster on port production efficiency. *Maritime Policy & Management*, 61–74.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *The climate-security nexus in the IPCC report Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. IPCC.
- Ishiyama, J., et al. (2021). Rethinking the undergraduate political science major: An introduction to the symposium. *PS: Political Science & Politics*, 353–357.
- Kevane, M., & Gray, L. (2008, May 20). *Darfur: Rainfall and conflict*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/228247235_Darfur_Rainfall_and_Conflict
- Kusuma, & dkk. (2021). Relevansi strategi pertahanan laut berdasarkan doktrin Jalesveva Jayamahe terhadap globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 77–100.

Malthus, T. (1998). *An essay on the principle of population*. Electronic Scholarly Publishing Project.

Oforle, & Emmanuel, O. (2012). Climate change and conflict in Darfur. *Nnamdi Azikiwe Journal of Political Science (NAJOPS)*, 95–106.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2016). *Armaments, disarmaments, and international security*. SIPRI.

UNDP. (1994). *Human development report 1994*. Oxford University Press.

UNHCR. (2025). *Sudan global appeal 2025 situation overview*. UNHCR.